



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan peta proses bisnis sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- b. bahwa Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi pada proses bisnis yang ada dan melakukan penyempurnaan terhadap peta proses bisnis sesuai dengan hasil evaluasi poses bisnis serta kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut peta proses bisnis, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Komisi Yudisial guna menghasilkan kinerja sesuai dan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.
- KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial dan Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial Level 1, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.01 PENYELENGGARAAN REKRUTMEN HAKIM



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.02 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

KY.02

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

KY.02.01

PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN
MASYARAKAT



KY.02.02

PELAKSANAAN ANALISIS DAN FORUM
KONSULTASI



KY.02.03

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU
KLARIFIKASI TERLAPOR



KY.02.04

PELAKSANAAN SIDANG PLENO



KY.02.05

PENERIMAAN PERMOHONAN/INISIATIF
PEMANTAUAN



KY.02.06

PELAKSANAAN ANALISIS PERMOHONAN/
INISIATIF PEMANTAUAN



KY.02.07

PELAKSANAAN PEMANTAUAN



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1

KY.03 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DAN UPAYA KESEJAHTERAAN HAKIM

KY.03

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DAN UPAYA KESEJAHTERAAN HAKIM

KY.03.01

PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN
KRITERIA PESERTA PELATIHAN



KY.03.02

PELAKSANAAN PELATIHAN HAKIM



KY.03.03

PELAKSANAAN EVALUASI PASCA
PELATIHAN HAKIM



KY.03.04

PENYUSUNAN REKOMENDASI UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
HAKIM



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.04 PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (PMKH)



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

**PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.05 PELAKSANAAN INVESTIGASI HAKIM**

KY.05

PELAKSANAAN INVESTIGASI HAKIM

KY.05.01

PELAKSANAAN PENDALAMAN KASUS



KY.05.02

PELAKSANAAN DETEKSI DINI



KY.05.03

PENELUSURAN REKAM JEJAK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.06 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN KAJIAN TERKAIT PERADILAN

KY.06

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN KAJIAN TERKAIT
PERADILAN

KY.06.01

PENGELOLAAN ANALISIS PUTUSAN DAN
KARAKTERISASI PUTUSAN



KY.06.02

PENGELOLAAN KAJIAN KELEMBAGAAN
DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN



KY.06.03

PENGELOLAAN EDUKASI PUBLIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1 KY.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

KY.07

PENGELOLAAN PENGHUBUNG

KY.07.01

PENGELOLAAN PENERIMAAN LAPORAN
MASYARAKAT DI KANTOR PENGHUBUNG



KY.07.02

PENGELOLAAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN OLEH PENGHUBUNG



KY.07.03

PENGELOLAAN PENELUSURAN REKAM
JEJAK OLEH PENGHUBUNG



KY.07.04

PERBANTUAN PELAKSANAAN TUGAS
LEMBAGA KOMISI YUDISIAL LAINNYA
OLEH PENGHUBUNG



KY.07.05

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.08 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KY.08

PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

KY.08.01

PENGELOLAAN KERJA SAMA DALAM
NEGERI



KY.08.02

PENGELOLAAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI



KY.08.03

PENGELOLAAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.09 PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KY.09
PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

KY.09.01
PENGELOLAAN LAYANAN DOKUMENTASI
DAN PUBLIKASI



KY.09.02
PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN
INFORMASI



KY.09.03
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.10 PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

KY.10
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI

KY.10.01

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI



KY.10.02

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI



KY.10.03

PENGELOLAAN KEAMANAN SISTEM
INFORMASI



KY.10.04

PENGELOLAAN DATA ANALISIS DAN
STATISTIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.12 PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

KY.12

PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

KY.12.01

FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
NASIONAL



KY.12.02

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS



KY.12.03

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN



KY.12.04

PENYELARASAN ANGGARAN



KY.12.05

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KINERJA DAN
ANGGARAN



KY.12.06

PELAKSANAAN ADMINISTRASI
REGISTRASI HIBAH



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.13 PENGELOLAAN KEUANGAN

KY.13

PENGELOLAAN KEUANGAN

KY.13.01

PELAKSANAAN URUSAN
PERBENDAHARAAN



KY.13.02

PELAYANAN ADMINISTRASI
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK



KY.13.03

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



KY.13.04

PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PENGESAHAN HIBAH



KY.13.05

VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



KY.13.06

PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
PEGAWAI



KY.13.07

PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA
PEGAWAI



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.14 PENYELENGGARAAN PRODUK HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

KY.14

PENYELENGGARAAN PRODUK HUKUM DAN BANTUAN

HUKUM

KY.14.01

PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
LEMBAGA DAN SUBSTANSI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)



KY.14.02

PENGELOLAAN BANTUAN HUKUM
LEMBAGA



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.15 PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN REFORMASI BIROKRASI

KY.15

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN
REFORMASI BIROKRASI

KY.15.01

PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN



KY.15.02

PENATAAN TATA LAKSANA



KY.15.03

PELAYANAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.16 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

KY.16

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

KY.16.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.02 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.03 PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA 
KY.16.04 PENGEMBANGAN TALENTA DAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.05 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.06 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN APARATUR SIPIL NEGARA 
KY.16.07 PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.08 PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI 	KY.16.09 PENGADAAN TENAGA AHLI 
KY.16.10 PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI 	KY.16.11 PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.12 PENGADAAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 
KY.16.13 PENGELOLAAN KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.14 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.15 PEMBERHENTIAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 
KY.16.16 PERENCANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 	KY.16.17 PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 	KY.16.18 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.17 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPROTOKOLAN

KY.17
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN
KEPROTOKOLAN

KY.17.01
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



KY.17.02
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA



KY.17.03
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



KY.17.04
PENGELOLAAN LAYANAN
KERUMAHTANGGAAN



KY.17.05
PELAYANAN PERSURATAN



KY.17.06
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN



KY.17.07
PENGELOLAAN KEARSIPAN



KY.17.08
PELAYANAN KEPROTOKOLAN



SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan peta proses bisnis sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- b. bahwa Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi pada proses bisnis yang ada dan melakukan penyempurnaan terhadap peta proses bisnis sesuai dengan hasil evaluasi poses bisnis serta kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:
- KESATU : Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial yang selanjutnya disebut peta proses bisnis, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Komisi Yudisial guna menghasilkan kinerja sesuai dan tugas dan fungsi Komisi Yudisial.
- KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial dan Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial Level 1, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.



PETA PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL


Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.01 PENYELENGGARAAN REKRUTMEN HAKIM



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.02 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

KY.02

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

KY.02.01

PENERIMAAN DAN VERIFIKASI LAPORAN
MASYARAKAT



KY.02.02

PELAKSANAAN ANALISIS DAN FORUM
KONSULTASI



KY.02.03

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU
KLARIFIKASI TERLAPOR



KY.02.04

PELAKSANAAN SIDANG PLENO



KY.02.05

PENERIMAAN PERMOHONAN/INISIATIF
PEMANTAUAN



KY.02.06

PELAKSANAAN ANALISIS PERMOHONAN/
INISIATIF PEMANTAUAN



KY.02.07

PELAKSANAAN PEMANTAUAN



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1

KY.03 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DAN UPAYA KESEJAHTERAAN HAKIM

KY.03

PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DAN UPAYA KESEJAHTERAAN HAKIM

KY.03.01

PENYUSUNAN USULAN JENIS DAN
KRITERIA PESERTA PELATIHAN



KY.03.02

PELAKSANAAN PELATIHAN HAKIM



KY.03.03

PELAKSANAAN EVALUASI PASCA
PELATIHAN HAKIM



KY.03.04

PENYUSUNAN REKOMENDASI UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
HAKIM



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.04 PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (PMKH)



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

**PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.05 PELAKSANAAN INVESTIGASI HAKIM**

KY.05

PELAKSANAAN INVESTIGASI HAKIM

KY.05.01

PELAKSANAAN PENDALAMAN KASUS



KY.05.02

PELAKSANAAN DETEKSI DINI



KY.05.03

PENELUSURAN REKAM JEJAK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.06 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN KAJIAN TERKAIT PERADILAN

KY.06

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN KAJIAN TERKAIT
PERADILAN

KY.06.01

PENGELOLAAN ANALISIS PUTUSAN DAN
KARAKTERISASI PUTUSAN



KY.06.02

PENGELOLAAN KAJIAN KELEMBAGAAN
DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN



KY.06.03

PENGELOLAAN EDUKASI PUBLIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1 KY.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

KY.07

PENGELOLAAN PENGHUBUNG

KY.07.01

PENGELOLAAN PENERIMAAN LAPORAN
MASYARAKAT DI KANTOR PENGHUBUNG



KY.07.02

PENGELOLAAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN OLEH PENGHUBUNG



KY.07.03

PENGELOLAAN PENELUSURAN REKAM
JEJAK OLEH PENGHUBUNG



KY.07.04

PERBANTUAN PELAKSANAAN TUGAS
LEMBAGA KOMISI YUDISIAL LAINNYA
OLEH PENGHUBUNG



KY.07.05

PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PENGHUBUNG KOMISI
YUDISIAL



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.08 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

KY.08

PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

KY.08.01

PENGELOLAAN KERJA SAMA DALAM
NEGERI



KY.08.02

PENGELOLAAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI



KY.08.03

PENGELOLAAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.09 PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KY.09
PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

KY.09.01
PENGELOLAAN LAYANAN DOKUMENTASI
DAN PUBLIKASI



KY.09.02
PENGELOLAAN LAYANAN DATA DAN
INFORMASI



KY.09.03
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.10 PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

KY.10
PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI

KY.10.01

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI



KY.10.02

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI



KY.10.03

PENGELOLAAN KEAMANAN SISTEM
INFORMASI



KY.10.04

PENGELOLAAN DATA ANALISIS DAN
STATISTIK



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.12 PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

KY.12

PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

KY.12.01

FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN
NASIONAL



KY.12.02

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS



KY.12.03

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN



KY.12.04

PENYELARASAN ANGGARAN



KY.12.05

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KINERJA DAN
ANGGARAN



KY.12.06

PELAKSANAAN ADMINISTRASI
REGISTRASI HIBAH



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.13 PENGELOLAAN KEUANGAN

KY.13

PENGELOLAAN KEUANGAN

KY.13.01

PELAKSANAAN URUSAN
PERBENDAHARAAN



KY.13.02

PELAYANAN ADMINISTRASI
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK



KY.13.03

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



KY.13.04

PELAKSANAAN ADMINISTRASI
PENGESAHAN HIBAH



KY.13.05

VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



KY.13.06

PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA
PEGAWAI



KY.13.07

PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA
PEGAWAI



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.14 PENYELENGGARAAN PRODUK HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

KY.14

PENYELENGGARAAN PRODUK HUKUM DAN BANTUAN

HUKUM

KY.14.01

PENGELOLAAN PRODUK HUKUM
LEMBAGA DAN SUBSTANSI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH)



KY.14.02

PENGELOLAAN BANTUAN HUKUM
LEMBAGA



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.15 PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN REFORMASI BIROKRASI

KY.15

PENGELOLAAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN
REFORMASI BIROKRASI

KY.15.01

PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN



KY.15.02

PENATAAN TATA LAKSANA



KY.15.03

PELAYANAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.16 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

KY.16

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

KY.16.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.02 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.03 PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA 
KY.16.04 PENGEMBANGAN TALENTA DAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.05 PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.06 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN APARATUR SIPIL NEGARA 
KY.16.07 PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA 	KY.16.08 PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA AHLI 	KY.16.09 PENGADAAN TENAGA AHLI 
KY.16.10 PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI 	KY.16.11 PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.12 PENGADAAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 
KY.16.13 PENGELOLAAN KINERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.14 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 	KY.16.15 PEMBERHENTIAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH 
KY.16.16 PERENCANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 	KY.16.17 PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 	KY.16.18 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN 

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.

PROSES BISNIS KOMISI YUDISIAL LEVEL 1
KY.17 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPROTOKOLAN

KY.17
PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN
KEPROTOKOLAN

KY.17.01
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



KY.17.02
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA



KY.17.03
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



KY.17.04
PENGELOLAAN LAYANAN
KERUMAHTANGGAAN



KY.17.05
PELAYANAN PERSURATAN



KY.17.06
PELAYANAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN



KY.17.07
PENGELOLAAN KEARSIPAN



KY.17.08
PELAYANAN KEPROTOKOLAN



SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE**.